

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab Suci

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007

### B. Buku

A. Basiq Djaliil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007

A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002

Abdul Halim, Icuk Ranga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, Dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, diterjemahkan oleh Ahmad S, Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002

Al-Imam Abu Zakariya Yahya, *Riyādusṣāliḥīn*, Al-Haramain, 2005

Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2005

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 1996

Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993

Departemen Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Modul Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan, 2007

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Ely Kusumastuti, "*Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata*", Thesis, Program Magister Hukum Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi, Universitas Diponegoro, 2002.

- Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis*  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2011
- Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara Negara dan Syariat Islam*, Jakarta: PT Darul Falah, 2006
- Jaelani Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2002
- Ramdlon Naning, Artikel, Penyelesaian Sengketa Dalam Islam, Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, 06 Spetember 2008
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Perdilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta Sinar Garafika, 2006
- Suryadi Agus *et al*, *Optimalisasi Peran Datun Kejaksaan dalam Penegakan Hukum*, Pusat penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI, 2004.
- Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ed. 1, Cet. 1, 2011

Teungku Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia, 2006

### **Praturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia No 67 (26 Juli 2004) tentang Undang-undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004

Lembaran Negara Republik Indonesia (28 April 2003) tentang UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003.

Lembaran Negara RI No 20 tahun 2006 (14 maret 2006), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah No 6 tahun 2006.

Lembaran Negara no 5 tahun 2004 (14 januari 2004) tentang Undang-undang Perbendaharaan Negara No 1 tahun 2004.

Lembaran Negara Republik Indonesia No 76 (31 Desember 1981) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981.

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.01/2005 Tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan (Road Map Departemen Keuangan tahun 2005-2009)

Lembaran Negara Republik Indonesia, No.104 tahun 1960 (24 september 1960) Undang-undang Republik Indonesia tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, No. 5 Tahun 1960.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

### Internet

Dhani Nasution, dalam <http://dedoubleyou.wordpress.com/2013/02/15/strategi-pengelolaan-barang-milik-negara-daerah-iii/>, 15 Februari 2013.

Kamus Bahasa Indonesia Online, dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/negara>.

Kejaksaan RI dalam [http://www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=3](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3)

M. Arhamul Wildan, Metode Penalaran Deduktif dan Induktif, dalam <http://arhamulwildan.blogspot.com>, (13 maret 2003)

Yuzril Ihza Mahendra dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329>, 8 Agustus 2010

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fatimah Albatul  
NIM : C03209058  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 dalam Kajian *Fiqh Siyāsah*.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2013

Saya yang Menyatakan,

Fatimah Al Batul

C03209058